

INFORMASI PENDIDIKAN DENGAN PORTAL LAYANAN PUBLIK NASIONAL

Rieka Mustika

Peneliti pada Puslitbang Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik,
Badan Litbang SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika

ABSTRACT

This article aims to give input to the Government in presenting educational information services. National Public Service Portal needed because of expected to bridge the interests of the community who wants one container of e-government facilities that are integrated, as well as in the central and local governments that have implemented e-government facilities in their respective institution to be well integrated in one this container. In the end it takes some websites to fill the service classification in this public service portal. Education is one of public service application is entered into a service classification that has been determined. JARDIKNAS-Network of National Education under the Ministry of National Education in terms of information on its web site eligible to be included in the national public service portal.

Keywords: National Public Service Portal, education information services

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu produk hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008. Kemudian pada 1 Mei 2010 UU tersebut sudah diberlakukan. UU KIP dirumuskan berdasarkan pertimbangan bahwa informasi adalah hak dasar semua warga negara. Hal ini sejalan dengan rumusan yang tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sana dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sejak tahun 1997 ketika reformasi bergulir, muncul banyak tuntutan publik terhadap keterbukaan/transparansi. Tuntutan tersebut rupanya direspon dengan baik oleh pemerintah, khususnya oleh legislatif. Maka, sejak itu pulalah beberapa undang-undang penting terbit, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik¹ Pemerintah dalam memberikan layanan memerlukan inovasi untuk pengembangan,

¹ <http://www.ugm.ac.id/new/?q=id/news/diskusi-menyongsong-berlakunya-uu-keterbukaan-informasi-publik>, diakses tgl 11 juni 2010, Pkl 07.40

penyelenggaraan e-Government yang sejalan dengan perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis untuk menuju terwujudnya pemerintahan yang semakin efektif. Portal layanan publik nasional adalah salah satu program dari E-Government dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat dan usahawan berdasarkan pengetahuan ekonomi (*knowledge-based economy*). Saat ini Layanan Online untuk publik masih terpencar-pencar. Masing masing Kementerian, Lembaga Tinggi Negara, Badan Usaha Milik Negara, dan Pemerintah Daerah itu berbeda-beda standarnya. Bahkan masing-masing Daerah yang memiliki layanan yang sama, Standar Pelayanan Onlinenya pun berbeda-beda. Sehingga belum adanya Integrasi antara layanan-layanan yang terkait pada 2 (dua) atau lebih Instansi. Untuk itu diperlukan adanya Sentra Layanan Terpadu bagi masyarakat untuk mengurus keperluannya via metoda Online. Saat ini sedang dikembangkan portal layanan publik oleh Direktorat E-Government Kementerian Komunikasi Informatika. Suatu portal layanan publik sejatinya harus berisikan secara lengkap semua aplikasi layanan publik yang telah online secara mandiri yang tersebar di masing-masing website atau portal pemerintahan pusat, pemerintahan daerah serta lembaga negara lainnya. Realisasinya dibutuhkan upaya untuk mendata secara jeli semua aplikasi-aplikasi layanan publik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk dimasukkan ke dalam klasifikasi layanan yang telah ditentukan, antara lain perizinan; Kependudukan; Pendidikan; Kebudayaan, rekreasi & olahraga; Kesehatan dan lingkungan; Karir & pekerjaan; Ketertiban, Keamanan & Pertahanan; Transportasi & telekomunikasi; Perumahan & transmigrasi. Klasifikasi ini dapat berkembang dan berubah sesuai padat/tidaknya aplikasi yang terdaftar di masing-masing klasifikasi itu, sehingga didapat keseimbangan yang wajar dari setiap klasifikasinya². Pendidikan merupakan salah satu aplikasi layanan publik yang dimasukkan ke dalam klasifikasi layanan yang telah ditentukan. Dalam mendukung Pemerintah untuk menyajikan layanan informasi pendidikan, dibutuhkan beberapa website untuk mengisi klasifikasi layanan di dalam portal layanan publik tersebut. Kemudian di antara banyak website pendidikan yang ada, JARDIKNAS-JeJaring Pendidikan Nasional di bawah Kementerian Pendidikan Nasional menurut peneliti informasinya layak untuk dimasukkan dalam portal layanan publik nasional. Jejaring Pendidikan Nasional atau Jardiknas sejak tahun 2006 telah menjadi program prioritas di Depdiknas dan menjadi salah satu *flagship* yang terbesar di Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DeTIKNas) yang dipimpin langsung oleh Presiden RI. Jardiknas memiliki tujuan untuk melayani e-Administrasi di lingkungan Depdiknas Pusat dan satker-satker terkait di dalam (daerah) maupun di luar negeri. Selain itu juga melayani e-Pembelajaran di jenjang pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi. Informasi-informasi pendidikan yang dilayani oleh Jardiknas tentunya dibutuhkan oleh publik.

² Miftah Arifin, *Panduan Pemakaian Portal Layanan Publik Nasional Berbasis Arsitektur Layanan Terintegrasi*, Kominfo, Oktober 2010

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pelayanan Informasi Publik

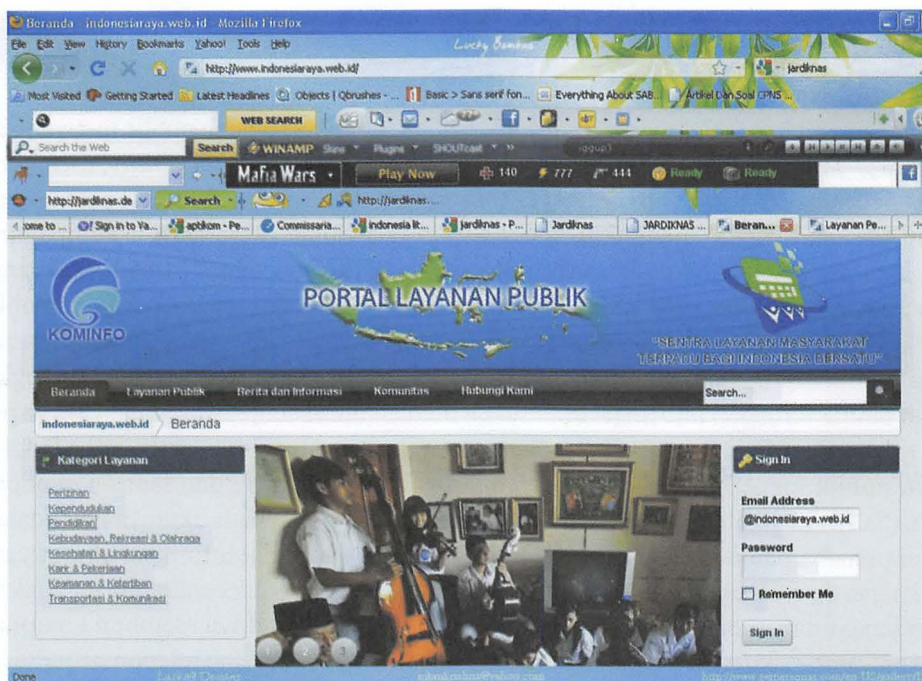
Dimensi Kualitas Pelayanan Informasi Publik: kualitas layanan public menyangkut persoalan (1). *Tangible*, menilai kualitas pelayanan dari indera (2). *Reliability*, mengukur keandalan pelayanan (akurat, zero defect) (3). *Responsiveness*, mengukur kecepatan waktu pelayanan (4). *Assurance*, mengukur kepercayaan pelayanan (keramahan, kompetensi, reputasi, keamanan). (5). *Empathy*, mengukur personalitas/mengenal pribadi pelayanan

Perilaku publik terhadap pelayanan informasi publik: Sementara itu perilaku publik terhadap layanan publik mempunyai ciri ciri sebagai berikut : (1). Penerimaan layanan informasi publik merupakan proses memahami isi *blackbox* perilaku publik. (2). Tingkat keyakinan publik terhadap informasi ditentukan oleh evaluasi subjektif publik. (3). Aspek kualitas (akurasi) informasi menjadi bahan utama evaluasi publik kritis. (4). Tingkat keyakinan publik menerima informasi dipengaruhi lokais wilayah dan lapisan ekonomi sosialnya. (5). Minat publik menerima informasi lebih didasarkan pada akurasi, kemudahan akses, dan pemahaman isi informasi. (6). Publik lebih memilih isi informasi akurat yang “dekat” dengan dirinya dibanding segi kemas informasi. (7). Publik cenderung mengakses informasi yang tidak membutuhkan “biaya pendukung lain” misalnya membeli komputer untuk akses internet, kursus aplikasi komputer, atau menyediakan line telepon. (8). Publik wilayah tertinggal dan lapisan bawah secara ekonomi-sosial cenderung lebih terpengaruh saluran personal (daripada media) dalam proses komunikasi dan menerima informasi.

Deskripsi Umum Portal Layanan Publik

Deskripsi Umum: E-Government sebagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah guna melayani masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi yang telah berjalan lebih dari 10 tahun tentunya sudah membuahkan banyak sekali portal (website) maupun aplikasi online yang berjalan di pemerintah pusat dan daerah. Efek yang dihasilkan adalah beragam standarisasi website dan terpencar-pencarnya fasilitas e-government yang membuat kesulitan tersendiri bagi masyarakat yang membutuhkan informasi dan fasilitas ini secara lebih lengkap dan menyeluruh. Untuk itu dibutuhkan Portal Layanan Publik Nasional yang diharapkan dapat menjembatani kepentingan di sisi masyarakat yang menghendaki satu wadah fasilitas e-government yang terpadu, serta di sisi pemerintahan pusat dan daerah yang telah mengimplementasikan fasilitas e-government di instansinya masing-masing untuk dapat terintegrasi dengan baik di satu wadah ini. Mengacu pada kerangka pikir pembangunan Portal Layanan Publik Nasional yang disyaratkan menggunakan solusi open source, terdapat aplikasi web yang harus dipersiapkan, yaitu Sistem Portal (Front End), Sistem Manajemen Konten (CMS), *Business Process Management* dan *Government Service Bus* yang akan menjadi antarmuka dengan semua web services yang berasal dari berbagai Aplikasi Layanan Publik³.

³ Miftah Arifin, *Panduan Pemakaian Portal Layanan Publik Nasional Berbasis Arsitektur Layanan Terintegrasi*, Kominfo, Oktober 2010



Gambar 1. Portal Layanan Publik

Sistem ini memiliki fungsi untuk manajemen pengguna sehingga jumlah pengguna beserta hak aksesnya dapat berubah-ubah. Pengguna sistem dibagi menjadi beberapa tingkatan pengguna yaitu :

Pengelola Portal

Administrator : Administrator adalah tingkatan akses tertinggi pada sistem portal ini, yang wewenang utamanya adalah mengatur hak akses setiap user yang ada di sistem ini, termasuk membuat user/manager baru dan menghapusnya. Umumnya seorang administrator adalah juga pimpinan proyek atau administrator portal ini. Jumlah administrator adalah 1 (satu) akun utama dan 1 (satu) akun back up. **Portal Manager:** Portal manager adalah pihak yang bertanggung jawab dalam pelayanan sehari-hari Portal Publik kepada masyarakat pengguna, yaitu *Registred Public* dan *General Public* dalam hal yang terkait dengan tugas-tugas customer service, seperti menjawab pertanyaan, keluhan, manajemen fungsi-fungsi komunitas pada portal dan urusan keanggotaan lainnya. Jumlah akun Portal manager bisa lebih dari satu, makin tinggi utilisasi portal publik ini, maka dibutuhkan makin banyak Portal Manager yang bertugas bersamaan di saat yang sama dan terbagi menjadi beberapa shift dalam periode 24 jam/hari.

Content Manager : *Content Manager* adalah pihak yang bertanggung jawab dalam hal penyediaan dan pembaruan konten di dalam Portal Publik ini, contohnya berita, pengumuman, kalender kegiatan, link eksternal, update banner-banner, materi animasi flash dan konten-konten lainnya baik yang dinamis (rutin diupdate) maupun yang statis (jarang diupdate). Jumlah akun Content Manager bisa lebih dari satu, semakin banyak

konten yang perlu diupdate, maka dibutuhkan beberapa Content Manager yang bertanggung jawab untuk melakukan update konten yang berbeda.

Application Access Manager : *Application Access Manager* adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melayani para pemilik aplikasi layanan publik (*Application Owner*). Tugasnya dimulai dari asistensi para *Application Owner* dalam hal pembuatan web service, membantu proses ujicoba dan instalasi hingga semua aplikasi layanan publik yang terhubung dengan portal publik ini dapat berjalan dengan baik. Jumlah akun *Application Access Manager* bisa lebih dari satu, semakin banyak instansi pemerintahan yang menyambungkan aplikasi layanan publiknya ke portal publik ini, maka semakin banyak pula petugas (*Application Access Manager*) yang dibutuhkan.

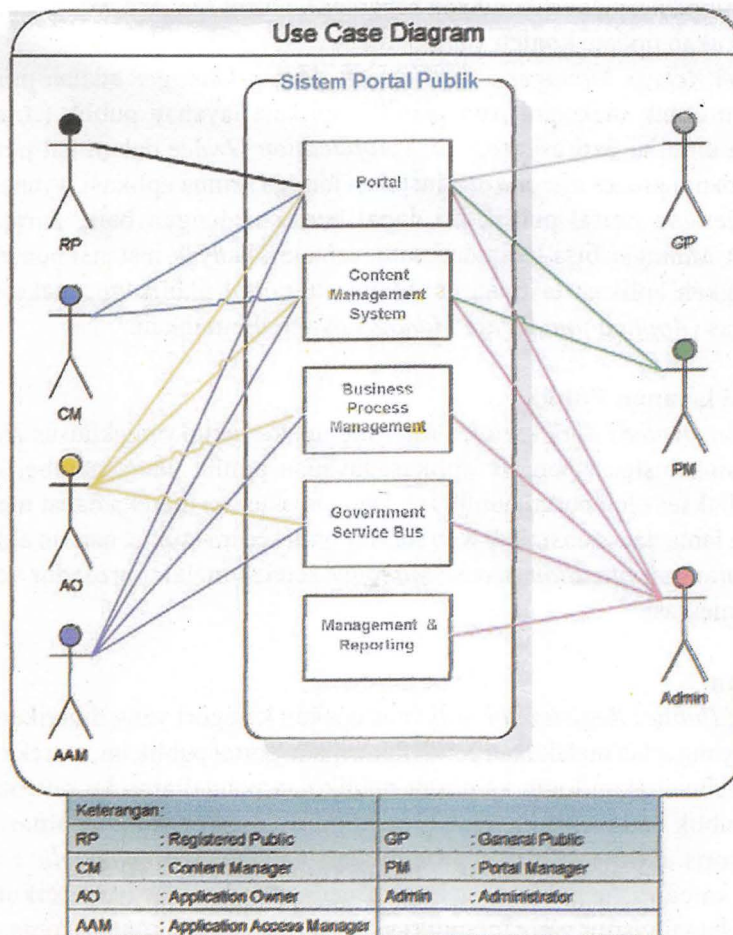
Penyedia Aplikasi layanan Publik

Application Owner : *Application Owner* merupakan akun yang khusus diciptakan untuk masing-masing instansi pemilik aplikasi layanan publik yang memberikan web servicenya untuk diakses oleh portal publik ini. Dengan akun ini mereka dapat melakukan update web service lama dan menambah web service baru secara online, namun aktifasinya dilakukan oleh seorang *Application Access Manager* setelah melalui prosedur verifikasi, ujicoba dan implementasi.

Masyarakat Umum

Registered Public: *Registered Public* merupakan kategori yang diberikan kepada masyarakat publik yang telah melakukan pendaftaran pada portal publik ini, mereka masing-masing memiliki sebuah akun login ke portal publik dan pendaftaran ke satu atau lebih aplikasi layanan publik yang tersedia. Kita memiliki informasi tentang identitas mereka, termasuk data historis aktifitas-aktifitas tertentu dari mereka. *General Public* : *General Public* merupakan kategori yang diberikan kepada masyarakat publik yang berkunjung ke portal publik ini sebagai visitor yang memiliki akses terbatas pada konten-konten umum, dan belum menjadi anggota portal maupun aplikasi publik⁴.

⁴ *Ibid.*



Gambar 2. Skema Pengguna Portal⁵

Sistem Manajemen Informasi Sekolah Komprehensif

Merujuk pada sistem informasi pendidikan yang dikembangkan di Korea, pengadopsian pendekatan yang lebih praktis atau aplikatif untuk memperluas kesempatan pembelajaran seumur hidup bagi masyarakat di semua tingkatan “Yang tak punya informasi” akan disediakan kesempatan pembelajaran melalui sebuah “jaringan pembelajaran sosial”. Sebuah jaringan pembelajaran di seluruh Negara, yang meliputi sekolah dasar dan jaringan pembelajaran di seluruh Negara, yang meliputi sekolah dasar dan menengah, institusi swasta, pusat pendidikan seumur hidup, dan sistem informasi lapangan kerja, akan dibangun untuk menawarkan dan mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi seluruh warga Negara.

⁵ Ibid

Tujuan dari informatisasi pendidikan meliputi: a) pembangunan fondasi untuk meningkatkan efisiensi administratif; b) memfasilitasi pertukaran informasi melalui jaringan informasi yang menghubungkan sekolah-sekolah, kantor-kantor pendidikan di metropolitan dan provinsi dan Departemen Pendidikan dan SDM; dan c) memperbaiki layanan administratif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat⁶. Di Korea pada tahun 2000, sebuah ISP telah dilakukan untuk menyusun Nationwide Educational Administration Information System untuk menangani tugas-tugas administrative utama (Manajemen pelajar dan SDM) di sector pendidikan. Sasarannya adalah untuk mengurangi pemrosesan transaksi pendidikan hingga 20-50 persen dan mengurangi waktu pemrosesan transaksi pendidikan hingga 20-50 persen dan volume dari dokumen kertas hingga 30 persen, dan untuk meningkatkan produktivitas operasional para guru hingga lebih dari 25 persen. Bagi para orang tua, penerbitan transkrip, sertifikat, pendaftaran atau kelulusan dari berbagai sekolah di dalam negeri akan menjadi lebih mudah⁷.

KONSEP JARDIKNAS

Jardiknas merupakan intranet/Wide Area Network (WAN) yang menghubungkan antara simpul pendidikan diseluruh Indonesia/nasional yang terdiri dari 4 zona jaringan, meliputi: (a). Zona Kantor Dinas/Insitusi: Transaksi data online SIM Pendidikan. (b). Zona Perguruan Tinggi (INHERENT): Riset dan Pengembangan IPTEKS.(c). Zona Sekolah (SchoolNet): Akses Informasi dan E-Learning Sekolah. (d). Zona Personal (Guru dan Siswa): Akses Informasi dan E-Learning Personal⁸ Website Jardiknas adalah <http://jardiknas.depdiknas.go.id> . Salah satu pilihan menu menarik yang ada di dalam website tersebut adalah e-pembelajaran. Sub menu pada menu tersebut antara lain:

(a). *Curriculum Wiki Curriki*

Dengan menggunakan Sistem Tinjauan Curriki (CRS), para ahli dan para guru dapat meninjau serta memberikan rating kepada bahan ajar yang ada di repositori Curriki. CRS memungkinkan orang-orang yang sedang mencari materi berkualitas tinggi untuk menemukan konten di repositori Curriki yang sudah sebelumnya diperiksa oleh para ahli di bidang yang bersangkutan.

(b). *e-Dukasi.net*

E-dukasi .Net adalah portal pendidikan yang menyediakan bahan belajar dan fasilitas komunikasi antar komunitas pendidikan. Portal ini berisi bahan belajar, wahana aktifitas komunitas dan info pendidikan. Manfaat portal e-dukasi.net antara lain :

1. Sumber belajar dan informasi pendidikan
2. Sarana komunikasi serta kolaborasi
3. Wahana berbagi informasi

⁶ Modul 3 Penerapan e-Government, Akademi Esensi TIK untuk Pimpinan Pemerintahan, UN-APCICT: 2009

⁷ *Ibid.*

⁸ <http://jardiknas.depdiknas.go.id>

(c). *m-edukasi*

Portal ini adalah portal manajemen konten (CMS) yang akan menyajikan mobile learning atau aplikasi pendidikan untuk handphone GRATIS! Aplikasinya dikembangkan BPM PUSTEKKOM dengan platform Flash Lite dan digunakan sebagai media pembelajaran mandiri.

(d). *Televisi edukasi*

Tujuan dari TVE adalah memberikan layanan siaran pendidikan berkualitas untuk menunjang tujuan pendidikan nasional. Sasaran TVE adalah Peserta didik dari semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, praktisi pendidikan, dan masyarakat.

(e). *How To Teach English (h2te)*

How To Teach English (h2te) adalah salah satu model baru tentang cara belajar dan membelajarkan di abad 21 yang dikhususkan bagi para guru Bahasa Inggris yang dikembangkan atas kerjasama antara British Council dengan Pustekkom, Depdiknas.

(f). *BSE (Buku Sekolah Elektronik)*

Berbagai macam buku pelajaran sekolah disediakan di halaman ini. Masyarakat dapat dengan mudah mendownload buku-buku tersebut dengan cara login terlebih dahulu.

(g). *Bimbel Online*

Berbagai ruang kelas disediakan di website ini. Materi dan try out dari tingkat SMP hingga SMA.

(h). *Crayonpedia*

Crayonpedia!, Let's Create your open education Encyclopedia. Ensiklopedia Pendidikan Berbasis Multikurikulum, Multiprogram dan Multimateri Pertama yang Dibangun oleh dan untuk Komunitas⁹.



⁹ *Ibid.*

PENUTUP

Kesimpulan

Mengingat layanan online untuk publik masih terpecah-pecah, masing-masing instansi berbeda-beda standarnya. Bahkan masing-masing daerah yang memiliki layanan yang sama, standar pelayanan onlinenya pun berbeda-beda. Dengan menggunakan portal pelayanan publik, masing-masing website tersebut dapat terintegrasi. Dalam mendukung Pemerintah untuk menyajikan berbagai layanan informasi, dibutuhkan beberapa website untuk mengisi klasifikasi layanan di dalam portal layanan publik tersebut. Salah satu layanan informasi yang diklasifikasi adalah informasi pendidikan. Mengenai layanan informasi pendidikan, dibutuhkan usaha oleh pemerintah untuk mengintegrasikan TIK ke dalam sistem pendidikan. Seperti yang telah dilakukan oleh Negara Korea, sistem manajemen informasi sekolah sudah dilakukan secara komprehensif, walaupun secara perlahan Indonesia sebaiknya meniru hal tersebut. Jardiknas yang selama ini sudah berjalan baik, sebaiknya diintegrasikan dalam portal layanan publik.

Dengan menu-menu yang menarik mengenai e-pembelajaran dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi pembelajaran. Jika layanan informasi pendidikan tersebut diterapkan, maka akan meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pemerintah dan menghilangkan lapisan birokrasi yang berlebihan untuk mendapatkan informasi.

Saran

Proses pengenalan portal layanan publik ini sebaiknya dibuat rencana dan strategi yang baik dan tepat untuk mengenalkan portal tersebut, jangan sampai setengah-setengah atau tidak sistematis. Karena akan menyebabkan portal tersebut kurang optimal dalam penggunaannya. SDM yang mengelola portal layanan publik nasional ini pun harus dipersiapkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Selain itu supaya lebih menjangkau semua lapisan masyarakat, sebaiknya layanan portal pelayanan publik ini didukung teknologi yang memungkinkan diakses melalui handphone dengan mudah dan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Miftah, *Panduan Pemakaian Portal Layanan Publik Nasional Berbasis Arsitektur Layanan Terintegrasi*, Kominfo, Oktober 2010
- Modul 3 Penerapan e-Government, Akademi Esensi TIK untuk Pimpinan Pemerintahan, UN-APCICT : 2009
- <http://www.ugm.ac.id/new/?q=id/news/diskusi-menyongsong-berlakunya-uu-keterbukaan-informasi-publik>, diakses tgl 11 juni 2010, Pkl 07.40